

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES MOROWALI

Moh. Fadzil Nur^{1*}, Juemi², Rizmala Nadiah Borahima³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
20-01-2026

Disetujui:
28-01-2026

Dipublikasi:
19-02-2026

Kata Kunci:
*Implementasi Kebijakan;
Kecelakaan Lalu Lintas;
Pelayanan Kepolisian;
Kebijakan Publik*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Morowali. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan personel, kompleksitas prosedur administrasi, koordinasi antarunit yang belum efektif, serta masih terbatasnya pemanfaatan media digital untuk sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung berupa kejelasan pembagian tugas dan komitmen petugas dalam penanganan kecelakaan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya, dan kualitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan global yang berdampak besar terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas sosial. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa kecelakaan jalan raya menyebabkan lebih dari satu juta kematian setiap tahun di seluruh dunia (World Health Organization, 2018). Di Indonesia, angka kecelakaan masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa upaya penanganan serta pencegahan belum sepenuhnya efektif.

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas bersifat multidimensional, meliputi faktor manusia, kendaraan, infrastruktur, dan penegakan hukum. Kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, serta keterbatasan pengawasan merupakan variabel yang sering menjadi pemicu kecelakaan. Oleh karena itu, penanganan kecelakaan tidak dapat hanya berfokus pada aspek represif, tetapi harus mencakup sistem respons kelembagaan yang efektif.

Dalam konteks hukum nasional, penanganan perkara kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas diproses melalui mekanisme peradilan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa aparat kepolisian memiliki peran strategis dalam memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur hukum.

Sebagai institusi pelaksana kebijakan, kepolisian memegang peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi regulasi lalu lintas. Implementasi kebijakan publik sendiri merupakan proses menerjemahkan keputusan politik menjadi tindakan nyata melalui program, prosedur, dan aktivitas administratif (Mazmanian & Sabatier, 1983). Keberhasilan implementasi

sangat bergantung pada kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola sumber daya, komunikasi, struktur, dan komitmen pelaksana (Edward III, 1980).

Di Kabupaten Morowali, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas tercatat hampir 150 kasus dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan kecelakaan masih menjadi isu penting yang memerlukan evaluasi kebijakan, khususnya pada tingkat implementasi di Satuan Lalu Lintas Polres Morowali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Morowali dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Implementasi adalah serangkaian aktivitas untuk mengoperasionalkan kebijakan agar menghasilkan dampak nyata (Winarno, 2012). Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya menjadi dokumen formal tanpa efek substantif.

Edward III (1980) mengemukakan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dunn (2018) menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari proses evaluasi karena keberhasilan kebijakan hanya dapat diukur melalui hasil nyata yang dihasilkan. Dengan demikian, analisis implementasi tidak hanya melihat kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga efektivitas dampaknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan penanganan kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Morowali berdasarkan pengalaman dan perspektif pelaksana serta masyarakat. Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis sebagaimana model analisis kualitatif interaktif. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polres Morowali merupakan satuan kepolisian wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk pada tahun 2020 sebagai respons terhadap kebutuhan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Wilayah hukumnya mencakup area seluas 5.472 km² dengan karakteristik geografis yang beragam, termasuk daerah terpencil yang memengaruhi aksesibilitas layanan kepolisian.

Hasil

Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui koordinasi internal antartetugas serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Petugas umumnya mampu menjelaskan prosedur penanganan kecelakaan kepada pelapor. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa penggunaan istilah hukum yang sulit dipahami

masyarakat serta keterbatasan media sosialisasi berbasis digital. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami alur penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.

Sumber Daya

Aspek sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan serta jumlah kejadian kecelakaan. Selain itu, keterbatasan sarana operasional di beberapa wilayah terpencil turut memengaruhi kecepatan respons penanganan kasus. Walaupun fasilitas dasar telah tersedia, distribusi sumber daya belum sepenuhnya merata sehingga pelaksanaan kebijakan belum optimal.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana menunjukkan kecenderungan positif. Petugas memiliki komitmen menjalankan tugas sesuai prosedur serta berupaya memberikan respons cepat terhadap laporan kecelakaan. Pembagian tugas telah diatur secara jelas sehingga memudahkan koordinasi internal. Namun pada kasus yang kompleks, koordinasi lintas unit masih memerlukan peningkatan agar proses penanganan berjalan lebih efisien.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi penanganan kecelakaan lalu lintas telah memiliki standar operasional prosedur yang jelas serta pembagian tugas yang terorganisasi. Walaupun demikian, prosedur administrasi yang panjang terkadang memperlambat proses penanganan laporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem birokrasi yang formal dapat menjadi faktor penghambat apabila tidak disertai mekanisme koordinasi yang fleksibel.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Morowali belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada aspek komunikasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan pemahaman masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan pesan kebijakan menjadi faktor penting dalam implementasi, karena komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap prosedur layanan.

Dari sisi sumber daya, keterbatasan personel dan fasilitas operasional menjadi kendala utama. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan sulit diimplementasikan secara optimal meskipun telah dirancang dengan baik.

Sementara itu, disposisi pelaksana menunjukkan kondisi relatif positif. Komitmen petugas dan kejelasan pembagian tugas menjadi faktor pendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana memiliki peran penting dalam menentukan kualitas implementasi kebijakan, karena pelaksana merupakan aktor utama yang menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.

Pada aspek struktur birokrasi, keberadaan standar operasional prosedur telah memberikan pedoman kerja yang jelas, tetapi prosedur administrasi yang panjang dapat menghambat kecepatan pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang terlalu formal dapat menurunkan efektivitas implementasi apabila tidak disertai mekanisme koordinasi yang efisien.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kualitas komunikasi, dan kesiapan sumber daya. Oleh karena itu,

peningkatan kualitas implementasi kebijakan memerlukan upaya simultan pada aspek struktural, sumber daya, dan manajerial.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Morowali belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan personel, kompleksitas administrasi, koordinasi antarunit yang belum maksimal, serta minimnya pemanfaatan media digital dalam sosialisasi kebijakan. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa komitmen petugas dan kejelasan pembagian tugas. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kualitas komunikasi kebijakan, dan kecukupan sumber daya pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, simplifikasi prosedur administratif, serta inovasi komunikasi publik berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas.

REFERENSI

- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis*. Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.
- World Health Organization. (2018). *Global status report on road safety*. World Health Organization.